

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Brotodirejo, Soebroto, 1989, *Polri sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., Penerjemah Khozim, M., 2024, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2023, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- K., Septiawan Santana, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Pembina Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Manan, Abdul, 2020, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA BOOKS, Sleman.
- Meoljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nussbaum, Martha C., 2006, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, and Species Membership*, Harvard University Press, United States of America.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2021, *Bahan kuliah (Metodologi penelitian ilmu hukum)*, Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbag Pressindo, Yogyakarta.

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Andayani, Ana, Nurcholis, Muhammad, Surahman, dan Elviandri, “Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda”, *Jurnal of Education Research*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Amaliah, Rasnah, Karlina Dieka, Rachmayanti, Ratu Indah, Hibatullah, Najib, dan Masaroh, Siti, “Sikap Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas: Faktor Jenis Kelamin, Usia, dan Tingkat Pendidikan”, *Literal: Disability Studies Jurnal*, Vol 2, No. 1, 2024.

Ariska, Dudung Indra, “Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 5, No. 1, April, 2019.

Aristawati, Putri Alysia Syahda, dan Wati, Rindiana Ulis, “Penegakan Hukum dalam Pelanggaran HAM”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Devi, Rosa Pijar Cahaya, “Implementasi Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-52*, Vol. 2, No. 2.

Eato, Yurina Ningsi, “Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Mar-Apr, 2017.

Hasan, Zainudin, Setiawan, Dodi, Dinatara, Angga Bela, Adnus, Erlangga, dan Gaol, Andre Agepe Lumban, “Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia yang Adil dan Beradab”, *Deposisi: Jurnal Publik Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2024.

- Jusuf, Muhammad Bacharudin, Ramadan, Rafli Riski, Herliansyah, Muhammad Rafly Fallah, Mazin, Andara Kalfhani, Putri, Meidina Amalia, Salhan Syahputera, Dwi Cahya, Suherman, Wita Anggraeni, Fauzah, Adri Muhammad “Pengenalan Aparat Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, No.2, Juli, 2023.
- Ketcil, Novita, Badu, Lisnawaty W., dan Mantali, Avelia Rahman Y, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Gorontalo), *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 5, 2024.
- Mareta, Josefhin, “Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)”, *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 7, 2016.
- Maulidina, Hasna Azahrani, Gunadi, Khofifah Setyoningrum, Sahara, Almaura Mutiara, dan Mahendra, Tiara Iga, “Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Peradilan di Kabupaten Karangantar”, *Intelektiva*, Vol. 4, No. 4, Desember, 2022.
- Mitendra, Hario Mahar, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum, *Jurnal Rechts Vinding*, 2018.
- Nasir, Gamal Abdul, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, September, 2017.
- Putri, Mariela Nikita, Amalo, Heryanto, dan Fanggi, Rosalind Angel, “Kendala-Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Wanita Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ende”. *Mahkamah: Jurnal Riset Hukum*, Vol. No. 4, Oktober, 2024.
- Sihotang Githa Angela, Pujiyono, Sa’adah, Nabitatus, “Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksaaan Tugas dalam Situasi Darurat”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2017.
- Sudaryanto, Agung, dan Krinan, Johny, “Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 4, 2023.
- Tasaripa, Kasman, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 1, 2013.
- Terok, Daff, “Kedudukan Saksi Korban Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, Okt-Des, 2012.

Zen, M., “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, Februari, 2020.

C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Ramadhany, M. Barly, 2022, “Objektifitas Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Disabilitas”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Rohman, Syaifur, “Implementasi Proses Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo)”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

D. Peraturan Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undanguan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana;

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

E. Internet

DIY, Dinas Sosial, “Grafik Series Data DIY Tahun 2021 s/d 2025”, bapperida.jogjaprov.go.id, pada laman: https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/chart/62, diakses pada 5 Mei 2025, pada jam 20.00 WIB.

Indonesia, Tim Advikasi dan Jaringan SIGAB, sigab.org, Data Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum oleh Sigab Indonesia dari Tahun 2016-2024, pada halaman: <https://sigab.org/berita-sigab/data-pendampingan-kasus-difabel-berhadapan-dengan-hukum-oleh-sigab-indonesia-dari-tahun-2016-2024/> diakses pada 24 Juli 2024, pada jam 22.19 WIB.